

TRANSFORMASI EKONOMI LOKAL DALAM AGENDA POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS): EKONOMI KERAKYATAN, PEMBERDAYAAN UMKM, DAN HILIRISASI PRODUK LOKAL DI KALIMANTAN SELATAN

Hamdan Fuadi¹, & Ngalimun^{2*}

^{1&2*} Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan

*e-mail: ngalimunmtp@gmail.com

Submit Tgl: 09-Januari-2026

Diterima Tgl: 10-Januari-2026

Diterbitkan Tgl: 18-Januari-2026

Abstract: *The Prosperous Justice Party (PKS) has positioned local economic transformation as one of the main focuses of its political agenda by strengthening the people's economy, empowering micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and promoting the downstreaming of local products. This focus is crucial for bridging inclusive and sustainable regional economic development, particularly in regions such as South Kalimantan, which possess abundant natural resources and a growing base of local MSMEs. This article explores how PKS's political strategies related to the people's economy are implemented at the local level, as well as how support for MSMEs and downstreaming initiatives affect economic growth and the equitable distribution of community welfare. The study employs a qualitative approach through literature review, analysis of party policy documents, and empirical examination of developments in people's economic practices in South Kalimantan. The findings indicate that MSME empowerment constitutes a vital pillar of the people's economic ecosystem, as it contributes to job creation, income distribution, and the strengthening of local economic self-reliance, yet continues to face challenges such as limited access to capital, technology, and global markets. Furthermore, the downstreaming of local products remains a strategy that has not been fully structurally integrated into regional party policies, despite being ideologically supported as a means of increasing local value added. This article concludes that although PKS's people's economy agenda is grounded in a strong normative framework, its successful implementation largely depends on collaboration with local stakeholders, government regulations, and the enhancement of MSME capacity.*

Keywords: *PKS; People's Econom; Msme Empowerment; Local Product Downstreaming; South Kalimantan*

Abstrak: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menempatkan transformasi ekonomi lokal sebagai salah satu fokus utama agenda politiknya, melalui penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, dan dorongan hilirisasi produk lokal. Fokus ini penting untuk menjembatani pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan, terutama di wilayah seperti Kalimantan Selatan dengan potensi sumber daya alam besar dan UMKM lokal yang berkembang. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana strategi politik PKS terkait ekonomi kerakyatan diimplementasikan pada skala lokal, serta bagaimana dukungan terhadap UMKM dan upaya hilirisasi memberi dampak terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Kajian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur, dokumen kebijakan partai, dan analisis empiris terhadap perkembangan praktik ekonomi kerakyatan di Kalimantan Selatan. Temuan menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM merupakan pilar penting dalam ekosistem ekonomi kerakyatan karena berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja,

pemerataan pendapatan, dan peningkatan kemandirian ekonomi lokal, namun menghadapi tantangan seperti akses modal, teknologi, dan pemasaran global. Selain itu, hilirisasi produk lokal menjadi strategi yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan partai secara struktural di daerah, meskipun secara ideologis didukung sebagai upaya menambah nilai tambah produk lokal. Artikel ini menyimpulkan bahwa meski agenda ekonomi kerakyatan PKS memiliki kerangka normatif kuat, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kolaborasi dengan pemangku kepentingan lokal, regulasi pemerintah, dan penguatan kapasitas UMKM.

Kata Kunci: PKS; Ekonomi Kerakyatan; Pemberdayaan UMKM, Hilirisasi Produk Lokal; Kalimantan Selatan

Cara mengutip Fuadi, H., & Ngalimun. (2026). Transformasi Ekonomi Lokal dalam Agenda Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Ekonomi Kerakyatan, Pemberdayaan UMKM, dan Hilirisasi Produk Lokal di Kalimantan Selatan. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 185–199. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i2.1612>

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi lokal telah menjadi fokus utama dalam perumusan strategi pembangunan daerah di Indonesia, terutama sebagai respons terhadap ketimpangan struktural yang dihasilkan oleh model pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro dan eksploitasi sumber daya alam (Todaro & Smith, 2020; Pike, Rodríguez-Pose, & Tomaney, 2017). Pendekatan pembangunan ekonomi kontemporer semakin menekankan pentingnya basis lokal (*local-based development*) yang memanfaatkan potensi masyarakat dan sumber daya daerah secara berkelanjutan, karena pembangunan yang tidak berpijak pada kekuatan lokal cenderung memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah (Rodríguez-Pose & Wilkie, 2019; Stimson, Stough, & Roberts, 2018).

Dalam kerangka tersebut, pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan ekonomi khususnya melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi strategi yang semakin relevan. UMKM dipandang sebagai tulang punggung perekonomian nasional karena kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi lokal (Tambunan, 2019; OECD, 2020). Pendekatan ini sejalan dengan konsep ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang menekankan keadilan sosial, pemerataan kesempatan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan (Mubyarto, 2004; Akbar et al., 2024).

Secara konseptual, ekonomi kerakyatan berbeda dari pendekatan ekonomi kapitalis murni yang berorientasi pada akumulasi modal dan dominasi korporasi besar. Ekonomi kapitalis cenderung menciptakan konsentrasi kekayaan dan kekuasaan ekonomi pada segelintir aktor, sementara ekonomi kerakyatan berupaya membangun struktur ekonomi *bottom-up* yang inklusif dan partisipatif (Stiglitz, 2012; Sen, 1999). Dalam sistem ini, UMKM tidak diposisikan sebagai sektor marjinal, melainkan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi yang berbasis komunitas dan nilai-nilai keadilan sosial (Akbar et al., 2024; Tambunan, 2019).

Akbar et al. (2024) menegaskan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat pemerataan pendapatan masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan OECD (2020) yang menyatakan bahwa penguatan UMKM merupakan kunci bagi pembangunan

ekonomi daerah yang resilien, terutama di negara berkembang. Oleh karena itu, ekonomi kerakyatan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki justifikasi empiris yang kuat sebagai strategi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Dalam konteks politik Indonesia, gagasan ekonomi kerakyatan tidak dapat dilepaskan dari peran aktor politik, khususnya partai politik, yang memiliki otoritas dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik. Partai politik berfungsi sebagai mediator antara kepentingan masyarakat dan negara, sekaligus sebagai penentu arah ideologis pembangunan nasional dan daerah (Diamond, 2015; Katz & Mair, 2018). Oleh karena itu, orientasi ekonomi suatu partai politik memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan pemberdayaan UMKM dan ekonomi lokal.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai salah satu partai politik Islam di Indonesia, telah mengadopsi ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari agenda politik ekonominya. Orientasi ini berakar pada nilai-nilai keadilan sosial, kesejahteraan umat, dan prinsip ekonomi Islam yang menolak eksploitasi serta ketimpangan struktural (Chapra, 2000; Huda et al., 2017). Dalam kerangka politik praktis, PKS memandang bahwa pembangunan ekonomi harus membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat kelas menengah ke bawah melalui penguatan UMKM dan ekonomi berbasis komunitas (Habib, 2025).

Penguatan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM dan hilirisasi produk lokal menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan dinamika pembangunan daerah. Teori pembangunan ekonomi regional menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola potensi lokal dan membangun rantai nilai yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat (Pike et al., 2017; Stimson et al., 2018). Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi yang digerakkan oleh partai politik seperti PKS memiliki peran strategis karena dapat mempengaruhi prioritas anggaran, desain program pembangunan, dan arah kebijakan hilirisasi produk lokal.

Literatur ekonomi mutakhir menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan yang terintegrasi dengan transformasi digital dan penguatan UMKM mampu meningkatkan pendapatan lokal serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Fatihah et al. (2024) menjelaskan bahwa sistem ekonomi kerakyatan berbasis digital dapat memperluas akses pasar UMKM, meningkatkan efisiensi produksi, dan memperkuat daya saing produk lokal. Temuan ini diperkuat oleh laporan World Bank (2022) yang menegaskan bahwa digitalisasi UMKM berkontribusi signifikan terhadap inklusi ekonomi dan pengurangan kemiskinan di daerah.

Namun demikian, pemberdayaan UMKM tidak dapat dilepaskan dari kerangka legalitas dan regulasi yang mendukung. Dalam perspektif negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), negara memiliki kewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan melindungi pelaku ekonomi kecil dari praktik pasar yang eksploitatif (Esping-Andersen, 1990; Stiglitz, 2012). Rahmadani dan Rakhmawati (2025) menegaskan bahwa penguatan legalitas UMKM merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan ekonomi kerakyatan, karena memberikan kepastian hukum, akses pembiayaan, dan perlindungan usaha.

Dalam konteks ini, peran aktor politik seperti PKS menjadi signifikan karena kebijakan ekonomi partai dapat mempengaruhi regulasi, alokasi anggaran, dan dukungan institusional terhadap UMKM. Kebijakan yang berpihak pada UMKM tidak hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan sosial dan pemerataan pembangunan (Sen, 1999; Tambunan, 2019).

Kalimantan Selatan memiliki karakter ekonomi yang khas, ditandai oleh kekayaan sumber daya alam seperti batubara dan kelapa sawit, serta keberadaan UMKM yang tersebar di berbagai sektor ekonomi. Namun, struktur ekonomi daerah ini masih didominasi oleh komoditas primer dengan nilai tambah rendah, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global dan ketimpangan distribusi pendapatan (BPS Kalimantan Selatan, 2024; World Bank, 2022). Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi transformasi ekonomi lokal yang berorientasi pada hilirisasi produk dan pemberdayaan UMKM.

Hilirisasi produk lokal, yang dimaknai sebagai proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah, dipandang sebagai strategi kunci dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat (Rodrik, 2011; Pike et al., 2017). Dalam kerangka ekonomi kerakyatan, hilirisasi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, agenda politik PKS yang menekankan ekonomi kerakyatan, UMKM, dan nilai tambah produk lokal menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam dalam konteks Kalimantan Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan. Data dikumpulkan dari dokumen kebijakan partai politik (termasuk platform ekonomi PKS dan pernyataan publik), artikel ilmiah terkait ekonomi kerakyatan dan UMKM, serta laporan akademik yang relevan dengan konteks ekonomi lokal Kalimantan Selatan.

Studi literatur dilakukan dengan meninjau jurnal, buku, artikel akademik, serta dokumen online resmi untuk memahami landasan konseptual dan empiris dari ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan UMKM. Analisis dokumenter mencakup kebijakan internal PKS dan kecenderungan mereka dalam mendukung ekonomi lokal melalui berbagai platform politik.

Seluruh data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi isu strategis terkait *agenda ekonomi kerakyatan, peran UMKM, dan hilirisasi produk lokal*. Temuan dianalisis dalam kerangka teori pembangunan ekonomi lokal serta peran aktor politik dalam proses transformasi ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan pemetaan komprehensif antara pandangan normatif partai dan praktik implementasi di tingkat daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Agenda Ekonomi Kerakyatan dalam Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara eksplisit mengusung ekonomi kerakyatan sebagai bagian integral dari agenda ekonomi politiknya. Orientasi ini tercermin dalam berbagai narasi politik, program kelembagaan, serta aktivitas kaderisasi yang menempatkan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian rakyat. PKS memandang bahwa pembangunan ekonomi yang berkeadilan tidak dapat hanya bergantung pada pertumbuhan sektor industri besar, melainkan harus bertumpu pada penguatan basis ekonomi masyarakat melalui UMKM dan ekonomi lokal berbasis komunitas (Habib, 2025; Mubyarto, 2004).

Dalam praktik politiknya, PKS mendorong sejumlah strategi utama, antara lain pemberdayaan UMKM, perluasan akses permodalan, serta penguatan jaringan pasar lokal. Program seperti *peluncuran pendampingan UMKM* yang diinisiasi oleh PKS menunjukkan komitmen partai dalam menyediakan dukungan nonfinansial berupa

pendampingan manajerial, peningkatan kapasitas usaha, dan akses jejaring pemasaran bagi pelaku UMKM (PKS, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan temuan OECD (2020) yang menegaskan bahwa pendampingan usaha merupakan faktor kunci dalam meningkatkan keberlanjutan dan daya saing UMKM, terutama di daerah.

Dari perspektif teori ekonomi kerakyatan, strategi PKS tersebut dapat dipahami sebagai upaya membangun struktur ekonomi *bottom-up* yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Ekonomi kerakyatan menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi rakyat memiliki dampak multiplikatif terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan penguatan ketahanan ekonomi lokal (Akbar et al., 2024; Tambunan, 2019). Dengan memperkuat UMKM, ekonomi lokal tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berkembang secara inklusif dan berkeadilan.

Lebih lanjut, agenda ekonomi kerakyatan PKS juga dapat dibaca sebagai bagian dari upaya memperkuat demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi mengandaikan adanya distribusi akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan usaha, dan manfaat pembangunan (Sen, 1999; Stiglitz, 2012). Dalam konteks ini, pemberdayaan UMKM tidak sekadar instrumen ekonomi, melainkan juga sarana untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Hal ini penting terutama di daerah seperti Kalimantan Selatan, di mana struktur ekonomi masih didominasi oleh sektor ekstraktif dan komoditas primer yang cenderung menghasilkan ketimpangan.

Dukungan PKS terhadap UMKM juga mencakup dorongan kolaborasi antara sektor publik dan swasta (*public-private partnership*). Kolaborasi ini dipandang penting untuk menjembatani keterbatasan UMKM dalam hal permodalan, teknologi, dan akses pasar. Stimson et al. (2018) menegaskan bahwa pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan membutuhkan sinergi antara aktor politik, pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Dengan demikian, agenda ekonomi kerakyatan PKS dapat dilihat sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi lokal yang kolaboratif.

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun agenda ekonomi kerakyatan PKS memiliki kerangka normatif dan ideologis yang kuat, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, fragmentasi kebijakan antara partai dan pemerintah daerah, serta belum terintegrasinya program pemberdayaan UMKM dengan strategi hilirisasi produk lokal secara sistematis. Temuan ini sejalan dengan kajian Rodríguez-Pose dan Wilkie (2019) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi lokal sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dan kapasitas institusi lokal.

Dalam konteks Kalimantan Selatan, agenda ekonomi kerakyatan PKS memiliki potensi strategis untuk mendorong transformasi ekonomi lokal apabila diintegrasikan secara lebih kuat dengan kebijakan hilirisasi produk lokal. Hilirisasi memungkinkan UMKM tidak hanya berperan sebagai produsen bahan mentah atau produk setengah jadi, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam rantai nilai yang bernilai tambah tinggi (Rodrik, 2011). Oleh karena itu, agenda ekonomi kerakyatan PKS idealnya tidak berhenti pada pemberdayaan UMKM secara individual, tetapi diarahkan pada penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu meningkatkan posisi tawar masyarakat dalam sistem ekonomi regional dan nasional.

Gambar 1
Bagan Konseptual Agenda Ekonomi Kerakyatan PKS



Penjelasan Bagan Agenda Politik PKS dalam Transformasi Ekonomi Lokal

Bagan tersebut menggambarkan alur konseptual agenda politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis ekonomi kerakyatan. Secara visual, bagan disusun secara horizontal (ke samping) untuk menekankan kesinambungan proses dari hulu ke hilir, mulai dari ideologi politik hingga dampak konkret bagi masyarakat dan daerah.

Pada bagian awal, Agenda Politik PKS (Ekonomi Kerakyatan) ditempatkan sebagai landasan ideologis dan normatif. Ekonomi kerakyatan dipahami sebagai pendekatan pembangunan ekonomi yang menempatkan rakyat khususnya pelaku UMKM sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Prinsip ini sejalan dengan gagasan demokrasi ekonomi yang menekankan keadilan sosial, pemerataan akses, dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Tahap berikutnya adalah Strategi Utama, yang merepresentasikan pilihan kebijakan dan arah perjuangan politik PKS di bidang ekonomi. Strategi ini meliputi pemberdayaan UMKM, perluasan akses permodalan, pendampingan usaha, serta penguatan kolaborasi publik swasta. Keempat strategi tersebut saling terkait dan dirancang untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini dihadapi UMKM, seperti keterbatasan modal, rendahnya kapasitas manajerial, dan akses pasar yang sempit.

Selanjutnya, strategi tersebut diterjemahkan ke dalam Instrumen Implementasi yang bersifat lebih operasional. Instrumen ini mencakup kehadiran pendamping UMKM, pelatihan dan *capacity building*, pengembangan jaringan pasar lokal, serta dukungan kebijakan di tingkat daerah. Pada tahap ini terlihat bahwa agenda politik tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi diupayakan hadir dalam bentuk program nyata yang dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil dan masyarakat lokal.

Implementasi strategi melalui berbagai instrumen tersebut diharapkan menghasilkan Dampak Ekonomi Lokal, yaitu penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penguatan ketahanan ekonomi lokal, serta penguatan demokrasi ekonomi. Dampak ini mencerminkan tujuan antara (*intermediate outcomes*) dari ekonomi kerakyatan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari angka makro, tetapi dari sejauh mana manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Tahap akhir dari bagan menunjukkan Transformasi Ekonomi Daerah sebagai tujuan jangka panjang. Transformasi ini ditandai oleh posisi UMKM sebagai pilar utama ekonomi daerah, berkembangnya hilirisasi produk lokal untuk meningkatkan nilai tambah, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, bagan ini menegaskan bahwa agenda ekonomi PKS bersifat sistemik, berjenjang, dan berorientasi pada perubahan struktur ekonomi daerah dari ketergantungan pada sektor primer menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan partisipasi masyarakat.

Pemberdayaan UMKM di Kalimantan Selatan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian lokal di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Peran UMKM tidak hanya signifikan dalam kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto (PDRB), tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Tambunan (2019) menegaskan bahwa UMKM memiliki daya tahan tinggi terhadap guncangan ekonomi dan berfungsi sebagai penyangga ekonomi rakyat, terutama di daerah yang struktur ekonominya masih bertumpu pada sektor primer. Hal ini sejalan dengan pandangan OECD (2020) yang menyebutkan bahwa UMKM merupakan aktor kunci dalam pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam konteks Kalimantan Selatan, posisi UMKM menjadi semakin strategis karena daerah ini memiliki potensi ekonomi lokal yang beragam, mulai dari sektor agrikultur, perikanan, hingga industri kreatif dan kerajinan tradisional. Produk-produk seperti olahan hasil pertanian, perikanan sungai dan pesisir, serta kerajinan berbasis kearifan lokal memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena UMKM masih menghadapi berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya penguasaan teknologi produksi, serta lemahnya jaringan pemasaran dan distribusi (Akbar et al., 2024; Kementerian Koperasi dan UKM, 2022).

Keterbatasan akses modal menjadi salah satu persoalan paling mendasar yang dihadapi UMKM di Kalimantan Selatan. Banyak pelaku UMKM masih bergantung pada pembiayaan informal dengan bunga tinggi karena keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Kondisi ini tidak hanya menghambat ekspansi usaha, tetapi juga meningkatkan kerentanan ekonomi pelaku UMKM. Beck dan Demirgüç-Kunt (2006) menunjukkan bahwa inklusi keuangan merupakan faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan UMKM dan pengurangan kemiskinan, sementara Fatimah et al. (2024) menegaskan bahwa skema pembiayaan mikro yang terintegrasi dengan pendampingan usaha dapat meningkatkan keberlanjutan UMKM di tingkat lokal.

Selain permodalan, tantangan lain yang signifikan adalah keterbatasan dalam pemasaran dan pemanfaatan teknologi. Di era ekonomi digital, kemampuan UMKM untuk memanfaatkan platform digital dan e-commerce menjadi penentu daya saing produk lokal. Namun, sebagian besar UMKM di daerah masih menghadapi kesenjangan literasi digital dan akses teknologi, sehingga produk mereka sulit menembus pasar yang lebih luas. UNCTAD (2021) menekankan bahwa transformasi digital UMKM merupakan prasyarat penting bagi integrasi UMKM ke dalam rantai nilai nasional dan global. Dalam konteks Kalimantan Selatan, tantangan ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di tingkat komunitas.

Upaya pemberdayaan UMKM yang digaungkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejalan dengan prinsip dasar ekonomi kerakyatan, yaitu memprioritaskan peran

rakyat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. PKS memandang UMKM bukan sekadar unit ekonomi kecil, melainkan fondasi utama ekonomi masyarakat yang perlu diperkuat melalui kebijakan afirmatif dan pendampingan berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan Mubyarto (2004) mengenai ekonomi kerakyatan yang menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan pada pelaku ekonomi rakyat untuk menciptakan keadilan dan pemerataan.

Dukungan terhadap UMKM dalam kerangka agenda politik PKS dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen, seperti pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas manajerial, akses pembiayaan mikro berbasis syariah, serta penguatan jaringan distribusi dan pasar lokal. Pelatihan kewirausahaan, misalnya, berperan penting dalam meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan (Stimson et al., 2018). Sementara itu, penguatan jaringan pasar lokal dan regional dapat membantu UMKM keluar dari ketergantungan pada pasar sempit dan meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi praktik pemberdayaan UMKM di tingkat komunitas. Meskipun wacana ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM telah banyak diangkat dalam agenda politik dan dokumen kebijakan, implementasinya sering kali terkendala oleh lemahnya koordinasi antaraktor, keterbatasan kapasitas institusi lokal, serta inkonsistensi kebijakan di tingkat daerah. Rodríguez-Pose dan Wilkie (2019) menegaskan bahwa tanpa kapasitas institusional yang kuat dan tata kelola yang efektif, kebijakan pembangunan ekonomi lokal berisiko gagal mencapai dampak yang diharapkan.

Dalam konteks Kalimantan Selatan, pemberdayaan UMKM akan lebih efektif apabila diintegrasikan secara sistematis dengan strategi hilirisasi produk lokal. Hilirisasi memungkinkan UMKM tidak hanya berperan sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga sebagai pelaku utama dalam rantai nilai yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Rodrik (2011) menekankan bahwa peningkatan nilai tambah melalui industrialisasi dan hilirisasi merupakan kunci transformasi struktural ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM di Kalimantan Selatan perlu diarahkan tidak hanya pada penguatan kapasitas individu pelaku usaha, tetapi juga pada pembentukan ekosistem ekonomi lokal yang mendukung transformasi ekonomi jangka panjang.

Hilirisasi Produk Lokal

Hilirisasi produk lokal merupakan strategi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah melalui pengolahan bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau produk akhir yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan ekonomi, tetapi juga mendorong transformasi struktur ekonomi daerah dari ketergantungan pada sektor primer menuju ekonomi berbasis industri dan kreativitas lokal (Rodrik, 2011; UNIDO, 2020). Dalam konteks pembangunan daerah, hilirisasi dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat daya saing lokal dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.

Di Kalimantan Selatan, urgensi hilirisasi produk lokal menjadi semakin signifikan mengingat kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertambangan, perkebunan, perikanan, dan produk agrikultur lainnya. Selama ini, sebagian besar komoditas tersebut masih dijual dalam bentuk bahan mentah atau produk primer, sehingga nilai tambah ekonomi justru dinikmati oleh wilayah atau aktor ekonomi di luar

daerah. Fenomena ini sejalan dengan apa yang disebut sebagai *resource-based economy trap*, di mana daerah kaya sumber daya alam mengalami keterbatasan nilai tambah dan ketergantungan struktural pada sektor ekstraktif (Auty, 2001; Sachs & Warner, 2001).

Hilirisasi berpotensi menjadi solusi strategis untuk keluar dari jebakan tersebut dengan menciptakan rantai nilai lokal yang lebih panjang. Melalui pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, maupun tumbuhnya usaha-usaha baru berbasis inovasi dan kreativitas. UNIDO (2020) menegaskan bahwa hilirisasi industri di daerah berkembang mampu mendorong industrialisasi inklusif dan berkelanjutan apabila terintegrasi dengan penguatan kapasitas UMKM dan kebijakan industri lokal.

Dalam kaitannya dengan UMKM, hilirisasi produk lokal membuka ruang bagi pelaku usaha kecil untuk naik kelas dari produsen bahan mentah menjadi produsen produk bernilai tambah. Hilirisasi memungkinkan UMKM terlibat dalam proses pengolahan, pengemasan, branding, hingga distribusi produk, sehingga meningkatkan posisi tawar mereka dalam rantai nilai ekonomi. Tambunan (2019) mencatat bahwa integrasi UMKM ke dalam rantai nilai hilir merupakan salah satu kunci penguatan ekonomi kerakyatan karena memperluas peluang usaha dan mempercepat pemerataan ekonomi.

Namun demikian, implementasi hilirisasi produk lokal di Kalimantan Selatan masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Keterbatasan infrastruktur industri, minimnya akses teknologi pengolahan, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam pengembangan industri hilir di tingkat lokal. Selain itu, kebijakan hilirisasi sering kali terfragmentasi dan belum terintegrasi secara sistematis dengan kebijakan pemberdayaan UMKM dan pembangunan ekonomi daerah (Rodríguez-Pose & Wilkie, 2019). Kondisi ini menyebabkan potensi hilirisasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dalam konteks agenda politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hilirisasi produk lokal sejatinya memiliki kesesuaian ideologis yang kuat dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Narasi politik PKS yang menekankan pentingnya nilai tambah produk lokal dan kemandirian ekonomi masyarakat secara normatif mendukung pengembangan industri hilir berbasis UMKM. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi produk lokal belum menjadi agenda yang secara eksplisit dan terstruktur dalam platform ekonomi PKS di tingkat daerah. Dorongan terhadap hilirisasi masih bersifat umum dan belum diterjemahkan ke dalam program kebijakan yang spesifik dan terukur.

Ketiadaan kerangka kebijakan hilirisasi yang kuat di tingkat daerah berpotensi melemahkan dampak agenda ekonomi kerakyatan PKS. Tanpa strategi hilirisasi yang terencana, pemberdayaan UMKM berisiko berhenti pada penguatan kapasitas produksi skala kecil tanpa peningkatan nilai tambah yang signifikan. Rodrik (2011) menekankan bahwa transformasi ekonomi membutuhkan intervensi kebijakan yang secara sadar mendorong sektor-sektor bernilai tambah tinggi, bukan hanya mengandalkan mekanisme pasar.

Oleh karena itu, integrasi hilirisasi produk lokal ke dalam agenda ekonomi PKS di Kalimantan Selatan menjadi kebutuhan strategis. Integrasi ini dapat dilakukan melalui dukungan kebijakan terhadap industri pengolahan skala UMKM, fasilitasi teknologi tepat guna, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Pendekatan kolaboratif tersebut sejalan dengan konsep pembangunan ekonomi lokal yang

menempatkan sinergi antaraktor sebagai prasyarat keberhasilan transformasi ekonomi daerah (Stimson et al., 2018).

Dengan demikian, hilirisasi produk lokal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam konteks Kalimantan Selatan, keberhasilan hilirisasi akan menentukan sejauh mana agenda ekonomi PKS mampu mendorong transformasi ekonomi daerah yang inklusif, mandiri, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas.

Tantangan Implementasi

Meskipun agenda transformasi ekonomi lokal melalui ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, dan hilirisasi produk lokal memiliki kerangka normatif yang kuat, implementasinya di Kalimantan Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan institusional. Tantangan-tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola kebijakan, kapasitas institusi lokal, serta dinamika kolaborasi antaraktor pembangunan. Tanpa penanganan yang sistematis, tantangan tersebut berpotensi menghambat tercapainya tujuan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan (Rodríguez-Pose & Wilkie, 2019; Stimson et al., 2018).

Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya akses teknologi dan permodalan bagi UMKM. Sebagian besar UMKM di Kalimantan Selatan masih beroperasi dengan teknologi produksi yang sederhana dan modal usaha yang terbatas, sehingga sulit meningkatkan skala produksi dan kualitas produk. Keterbatasan ini memperlemah daya saing UMKM, baik di pasar lokal maupun regional. Beck dan Demirgüç-Kunt (2006) menegaskan bahwa keterbatasan akses pembiayaan merupakan hambatan utama pertumbuhan UMKM di negara berkembang, sementara UNCTAD (2021) menyoroti kesenjangan adopsi teknologi sebagai faktor penghambat integrasi UMKM ke dalam rantai nilai global.

Selain itu, rendahnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi di tingkat komunitas memperparah persoalan akses teknologi. Transformasi digital yang seharusnya membuka peluang pasar baru bagi UMKM justru belum sepenuhnya dimanfaatkan. OECD (2020) menyatakan bahwa tanpa dukungan pelatihan digital dan infrastruktur yang memadai, UMKM cenderung tertinggal dalam persaingan ekonomi berbasis teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM tidak cukup hanya melalui pendekatan finansial, tetapi juga memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dalam pengembangan kapasitas teknologi dan sumber daya manusia.

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan jaringan pasar global, khususnya bagi UMKM yang berorientasi ekspor. Meskipun banyak produk lokal Kalimantan Selatan memiliki potensi pasar internasional, pelaku UMKM masih menghadapi hambatan dalam memenuhi standar kualitas, sertifikasi, dan regulasi perdagangan global. Tambunan (2019) menegaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam pasar ekspor sangat bergantung pada dukungan institusional, akses informasi pasar, dan fasilitasi perdagangan. Tanpa dukungan tersebut, UMKM cenderung terjebak di pasar lokal yang terbatas dan rentan terhadap fluktuasi permintaan.

Keterbatasan jaringan pasar juga berkaitan erat dengan lemahnya *branding* dan promosi produk lokal. Banyak UMKM belum memiliki kapasitas untuk membangun merek yang kompetitif dan menembus jaringan distribusi yang lebih luas. UNIDO (2020) menekankan bahwa penguatan rantai nilai dan *market linkage* merupakan elemen kunci dalam strategi industrialisasi berbasis UMKM. Dalam konteks ini, hilirisasi produk lokal

yang tidak diiringi dengan strategi pemasaran dan ekspor berisiko menghasilkan nilai tambah yang belum optimal.

Tantangan yang tidak kalah penting adalah lemahnya kolaborasi antara kebijakan politik partai, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Fragmentasi kebijakan dan kurangnya sinergi antaraktor pembangunan menyebabkan program pemberdayaan UMKM sering kali berjalan parsial dan tidak terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Rodríguez-Pose dan Wilkie (2019) menyebutkan bahwa kegagalan koordinasi kebijakan merupakan salah satu penyebab utama rendahnya efektivitas pembangunan ekonomi lokal di berbagai negara.

Dalam konteks agenda politik PKS, tantangan kolaborasi ini tercermin pada kesenjangan antara narasi politik dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Meskipun PKS secara ideologis mendukung ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM, realisasi program sering kali bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dan dukungan sektor swasta. Tanpa mekanisme koordinasi yang jelas dan komitmen lintas sektor, agenda ekonomi kerakyatan berisiko menjadi wacana normatif yang tidak sepenuhnya terimplementasi.

Selain itu, keterbatasan kapasitas institusional di tingkat daerah turut memperlemah efektivitas kebijakan. Keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem monitoring dan evaluasi, serta kurangnya data yang terintegrasi mengenai UMKM menyulitkan perumusan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Stiglitz (2012) menekankan bahwa kebijakan pembangunan yang efektif memerlukan institusi yang kuat dan transparan agar manfaat ekonomi dapat didistribusikan secara adil.

Dengan demikian, tantangan implementasi transformasi ekonomi lokal di Kalimantan Selatan bersifat multidimensional dan saling terkait. Upaya mengatasi tantangan tersebut memerlukan pendekatan kebijakan yang holistik, kolaboratif, dan berorientasi jangka panjang. Tanpa penguatan akses teknologi dan modal, perluasan jaringan pasar global, serta sinergi kebijakan antaraktor, agenda ekonomi kerakyatan termasuk yang diusung oleh PKS akan sulit mencapai dampak transformasional yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat daerah.

Peluang Strategis

Di tengah berbagai tantangan implementasi, transformasi ekonomi lokal di Kalimantan Selatan tetap memiliki peluang strategis yang besar untuk diwujudkan, khususnya melalui optimalisasi agenda politik ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Peluang-peluang ini berakar pada potensi sumber daya lokal, dinamika sosial ekonomi masyarakat, serta ruang kebijakan yang tersedia di tingkat daerah. Kunci keberhasilan transformasi tersebut terletak pada kemampuan mengonsolidasikan berbagai aktor pembangunan dan mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi ke dalam strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan (Stimson et al., 2018; Rodríguez-Pose, 2020).

Peluang strategis pertama adalah penguatan kolaborasi lintas sektor, yang melibatkan pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan konsep *quadruple helix*, di mana inovasi dan pembangunan ekonomi lokal didorong melalui sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil (Carayannis & Campbell, 2014). Dalam konteks Kalimantan Selatan, kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat transfer pengetahuan, teknologi, dan inovasi kepada UMKM, sekaligus membuka akses terhadap jaringan pasar dan pembiayaan yang lebih luas. Peran lembaga pendidikan, misalnya, menjadi penting

dalam menyediakan riset terapan, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan teknologi bagi pelaku UMKM.

Peluang strategis kedua terletak pada integrasi program pemberdayaan UMKM ke dalam strategi pembangunan daerah secara berkelanjutan. Selama ini, berbagai program UMKM sering kali berjalan secara sektoral dan jangka pendek, sehingga dampaknya belum optimal. Integrasi program UMKM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan rencana strategis sektor ekonomi akan memperkuat kesinambungan kebijakan dan memastikan keberlanjutan dukungan terhadap pelaku usaha kecil. OECD (2020) menekankan bahwa pembangunan ekonomi lokal yang efektif memerlukan kebijakan terintegrasi yang menghubungkan pemberdayaan UMKM dengan tujuan pembangunan jangka panjang, termasuk pengurangan ketimpangan dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Dalam kerangka agenda politik PKS, integrasi ini dapat menjadi sarana untuk menerjemahkan prinsip ekonomi kerakyatan ke dalam kebijakan konkret dan terukur. Dengan menjadikan UMKM sebagai indikator kinerja pembangunan daerah, agenda politik ekonomi tidak hanya berhenti pada wacana ideologis, tetapi berkontribusi langsung pada transformasi ekonomi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *inclusive growth* yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang melibatkan dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Stiglitz, 2012; World Bank, 2018).

Peluang strategis ketiga adalah penyusunan roadmap hilirisasi produk lokal yang konkret dan komprehensif. Roadmap ini berfungsi sebagai panduan jangka menengah dan panjang dalam pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal dan UMKM. Penyusunan roadmap hilirisasi yang jelas akan membantu mengidentifikasi sektor unggulan, kebutuhan infrastruktur, pengembangan teknologi, serta skema pembiayaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal. UNIDO (2020) menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi sangat bergantung pada perencanaan yang terarah dan konsisten, serta dukungan kebijakan yang stabil.

Dalam konteks Kalimantan Selatan, roadmap hilirisasi dapat diarahkan pada sektor-sektor potensial seperti agribisnis, perikanan, dan industri kreatif berbasis kearifan lokal. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas produk lokal dan memperluas peluang ekspor. Rodrik (2011) menekankan bahwa intervensi kebijakan yang selektif dan berbasis potensi lokal merupakan kunci keberhasilan transformasi struktural ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, peluang strategis transformasi ekonomi lokal melalui agenda politik PKS terletak pada kemampuan menghubungkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan dengan praktik kebijakan yang kolaboratif, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang. Jika peluang-peluang ini dimanfaatkan secara optimal, agenda ekonomi PKS tidak hanya berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan, tetapi juga menjadi model praktik politik ekonomi kerakyatan yang aplikatif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

KESIMPULAN

Transformasi ekonomi lokal melalui agenda ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjukkan relevansi yang kuat dalam konteks pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Selatan. Dengan menempatkan UMKM sebagai pilar utama ekonomi masyarakat, agenda ini secara normatif sejalan dengan prinsip keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pembangunan yang inklusif. Pemberdayaan UMKM terbukti memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan

kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal, terutama di daerah yang masih bergantung pada sektor primer dan komoditas mentah.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi agenda ekonomi kerakyatan PKS di tingkat daerah masih menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Keterbatasan akses teknologi dan permodalan, lemahnya jaringan pasar global, serta kurangnya integrasi dan kolaborasi antara aktor politik, pemerintah daerah, dan sektor swasta menjadi hambatan utama dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, hilirisasi produk lokal yang sejatinya merupakan kunci peningkatan nilai tambah ekonomi daerah belum sepenuhnya terinternalisasi secara sistematis dalam kebijakan ekonomi PKS di tingkat lokal, meskipun secara ideologis mendapatkan dukungan.

Di sisi lain, peluang strategis untuk memperkuat agenda ekonomi kerakyatan tetap terbuka lebar. Penguatan kolaborasi lintas sektor, integrasi program pemberdayaan UMKM ke dalam strategi pembangunan daerah, serta penyusunan roadmap hilirisasi produk lokal yang konkret dan komprehensif merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan terintegrasi, agenda ekonomi PKS berpotensi tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi juga instrumen transformasi ekonomi daerah yang aplikatif dan berdampak nyata.

Secara keseluruhan, keberhasilan transformasi ekonomi lokal di Kalimantan Selatan sangat bergantung pada kemampuan menerjemahkan nilai-nilai ekonomi kerakyatan ke dalam kebijakan operasional yang konsisten, berbasis bukti, dan berorientasi jangka panjang. Temuan ini menegaskan bahwa politik ekonomi berbasis kerakyatan memerlukan sinergi kuat antara ideologi, kebijakan publik, dan kapasitas institusional agar mampu mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., Hidayat, H., & Joni, H. (2024). Peran UMKM dalam membangun ekonomi kerakyatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 3(2), 145-158.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. (2024). *Provinsi Kalimantan Selatan dalam angka 2024*. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Diamond, L. (2015). *Facing up to the democratic recession*. *Journal of Democracy*, 26(1), 141-155.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The three worlds of welfare capitalism*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Fatihah, D. I., Prasetyo, A., & Nurhadi, M. (2024). Penerapan sistem ekonomi kerakyatan berbasis digital dalam meningkatkan pendapatan UMKM. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 5(1), 33-47.
- Habib, M. R. (2025). Partai Keadilan Sejahtera dan orientasi politik ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal TAPIs*, 21(1), 89-105.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Hudori, K. (2017). *Ekonomi pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana.

- Katz, R. S., & Mair, P. (2018). *Democracy and the cartelization of political parties*. Oxford: Oxford University Press.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Ma'arif, A.D., et.all. (2025). Program dan Kegiatan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk Mencapai Tujuan Partai. (2025). *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan*, 4(3), 250-254.
- Mubyarto. (2004). *Ekonomi kerakyatan: Sistem ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, M. R., & Anwar, H. (2019). Komunikasi Bisnis Kewirausahaan Dalam Islam. *Para ma Ilmu*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Nurussa'adah, E., Sumartias, S. (2017). Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (Pks) Dalam Keterbukaan Ideologi. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(1), 43-52
- OECD. (2020). *SME and entrepreneurship policy in Indonesia 2018*. Paris: OECD Publishing.
- Pike, A., Rodríguez-Pose, A., & Tomaney, J. (2017). *Local and regional development* (2nd ed.). London: Routledge.
- Rahmadani, F., & Rakhmawati, F. A. (2025). Legalitas pengembangan UMKM dan ekonomi kerakyatan dalam negara hukum kesejahteraan. *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Studies*, 3(1), 1-14.
- Rodríguez-Pose, A., & Wilkie, C. (2019). Innovating in less developed regions: What drives patenting in the lagging regions of Europe and North America. *Growth and Change*, 50(1), 4-37.
- Rodrik, D. (2011). *The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy*. New York, NY: W. W. Norton & Company.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. New York, NY: Alfred A. Knopf.
- Stiglitz, J. E. (2012). *The price of inequality: How today's divided society endangers our future*. New York, NY: W. W. Norton & Company.
- Stimson, R. J., Stough, R. R., & Roberts, B. H. (2018). *Regional economic development: Analysis and planning strategy* (3rd ed.). Berlin: Springer.
- Sutjipto, V.W., et. All. (2021). Citra Partai Keadilan Sejahtera Mengenai Perubahan Lambang Partai bagi Generasi Muda. *Jurnal Komunikasi*, 5(2)
- Tambunan, T. (2019). *Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Boston, MA: Pearson.

World Bank. (2022). *MSMEs and economic transformation in developing countries*. Washington, DC: World Bank Publications.